

ABSTRAK
KONSEP PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR DI
WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA

Hak-hak atas tanah menurut UUPA ke dalam Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah dan Hak Memungut Hasil Hutan serta Hak-hak lainnya yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas dan hak-hak yang sifatnya sementara, dimaksudkan untuk memberikan hak atas tanah berdasarkan peruntukannya dan subjek yang memohon hak atas tanah tersebut. Akibat belum terlaksananya pembangunan atau penggunaan tanah tersebut sesuai dengan peruntukannya, maka tanah yang bersangkutan dapat dianggap sebagai tanah yang diterlantarkan oleh pemegang hak.

Permasalahan dalam tesis ini yaitu, bagaimana pelaksanaan penertiban terhadap tanah terlantar di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dan Bagaimana konsep penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar di Wilayah Propinsi DKI Jakarta. Tujuannya yaitu, untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penertiban terhadap tanah terlantar di Wilayah Provinsi DKI Jakarta serta mengkaji dan menganalisis konsep penertiban dan pendayagunaan Tanah Terlantar di Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Metode yang digunakan adalah *Socio Legal*. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, sumber dan jenis data menggunakan data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan, pelaksanaan penertiban terhadap tanah terlantar di Wilayah Provinsi DKI Jakarta faktanya belum terlaksana hanya di jadikan tanah terindikasi terlantar, dengan reforma agraria dapat mewujudkan keadilan termasuk kesetaraan gender dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya agraria/sumber daya alam. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 10 Per Ka BPN RI Nomor 4 Tahun 2010 Jo Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar. Konsep penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar di Wilayah Propinsi DKI Jakarta belum ada pendayagunaan karena tanah di wilayah ini masih terindikasi, dengan menggunakan konsep keadilan sosial dalam penertiban tanah terindikasi terlantar sebagai memberikan landasan bagi setiap orang untuk mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk menerima bagian manfaat tanah baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

Atas dasar uraian tersebut, Penulis memberikan saran untuk pemerintah hendaknya menyempurnakan TAP MPR No.IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam menjadi sebuah undang-undang yang berlaku di Indonesia sebagai pembaharuan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pendayagunaan tanah terlantar, pemerintah (Badan Pertanahan Nasional RI) hendaknya membuat kebijakan tentang tata cara pendayagunaan tanah terlantar yang dapat dipakai sebagai pedoman teknis, sehingga tanah-tanah terlantar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam memperbaiki keadaan sosial ekonomi masyarakat.

Kata Kunci : Penertiban, Pendayagunaan, Tanah Terlantar

ABSTRACT
CONTROLLING AND UTILIZATION CONCEPT OF WASTELAND IN DKI
JAKARTA PROVINCE

Land rights based on UUPA are for ownership, Right to business, right to build, right to use, right to rent, exploitation, right to get forest product, and also other rights which are excluded the right above and temporary right, to give right on the land based on its allocation and person who is asking for the land. Due to the development and utilization have not been implemented as its allocation, the related land can be considerate as wasteland by the right holder.

The issues in this tesis are: how to control the wasteland in DKI Jakarta Province and what is the concept of controlling and utilization of wasteland in DKI Jakarta Province. The aims are to know and analyze controlling implementation of wasteland in DKI Jakarta Province and also examining and analyzing the concept of analyzing and utilization of wasteland in DKI Jakarta Province.

The writer used Socio Legal Methode in this research. Research specification is analytic descriptive. Its source and kind of data used primary and secondary datas by field study and literature study while technic of analysis data used qualitative analysis.

Based on the discussion can be concluded that the controlling implementation on wasteland in DKI Jakarta Province has not implemented, it is just be wastedland, by reforma agraria can achieve justice included gender equality in possession, property, utilization, exploitation, and maintenance agrarian resource / natural resource.

On the explanation above, the writer suggested that the government has to accomplish TAP MPR Number IX/MRP/2001 on agrarian renewing and resource management as Indonesian law as the renewing of agrarian included a continous process related to reordering of possession, property, utilization and exploitation of agrarian resource, executed in achieving certainty law protection also justice and prosperity of all Indonesian people. In utilization of wasteland, the government (National Land Agency Republic of Indonesia) has to create a policy on procedure of wasteland utilization which is used as technical guidance, so that the wastelands can be used optimally in repairing social economy of society.

Keywords: Controlling, Utilization, Wasteland